

BAB V

KESIMPULAN

Semenjak Erdogan menjabat sebagai Presiden pada tahun 2014, perubahan politik sudah mulai terasa. Erdogan seolah “mengikis” demokrasi yang telah ia bangun sendiri selama bertahun-tahun sebagai penguasa Turki sejak 2003 yang dimulai sebagai Perdana Menteri. Erdogan menjadi sosok yang anti kritik bahkan siapapun yang mengkritik pemerintah, berhadapan dengan hukum. Erdogan mulai menjelma sebagai pemimpin yang cenderung otoriter hingga terjadi peristiwa kudeta militer pada 15 Juli 2016, namun peristiwa kudeta militer yang gagal ini justru menjadi jalan yang mulus bagi Erdogan untuk bertindak semakin otoriter.

Atas terjadinya kegaduhan sosial dalam kudeta militer yang gagal ini Presiden Erdogan kemudian melakukan tindakan yang represif. Pemerintah Turki menetapkan status darurat (*state of emergency*) selama tiga bulan dan kemudian diperpanjang satu tahun untuk 'membersihkan' musuh-musuh politik dan semua pihak yang terlibat dalam kudeta, khususnya pengikut Fethullah Gulen yang dituding mendalangi Kudeta. Erdogan menyatakan dengan tegas bahwa yang melakukan aksi kudeta militer adalah gerakan Gulenist atau Hizmet, yang sudah tersebar di Turki hingga ke negara-negara lain. Erdogan menetapkan Hizmet merupakan teroris dan menyebutnya sebagai “negara dalam negara” atau musuh dalam selimut yang berusaha menjatuhkannya dan menguasai Turki. Selain itu Erdogan juga melakukan “pembersihan” pada lembaga militer, karena insiden kudeta juga patut dicurigai bahwa ada motif keresahan pihak militer terkait haluan politik Erdogan yang dianggap menghilangkan nilai-nilai sekulerisme Turki, walau Erdogan selalu membantahnya.

Kurang satu tahun dari insiden kudeta, tepatnya Minggu 16 April 2017, Erdogan memenangkan referendum untuk mengubah sistem parlementer Turki menjadi presidensial

sekaligus memberikan wewenang yang lebih besar untuk presiden. Dengan konstitusi baru tersebut peran Presiden tidak sekedar seremonial seperti sebelumnya, bahkan kekuasaan Presiden dalam politik Turki menjadi semakin powerful dan nyaris tanpa batas. Media media Turki pun memberikan sebutan baru untuk Erdogan yakni “Sultan Erdogan”. Referendum ini dilaksanakan masih dalam kondisi darurat yang diumumkan pemerintah sejak terjadinya kudeta militer yang gagal pada tahun 2016, maka kegagalan kudeta ini dimanfaatkan oleh Erdogan untuk menaikkan popularitasnya dan mendapat simpati dari masyarakat Turki hingga dapat memenangkan referendum.

Banyak pihak yang meyakini bahwa terjadinya kudeta militer sampai pada terjadinya referendum adalah sesuatu yang memang sudah di rencanakan dan di *design* oleh Erdogan sendiri, artinya ada motif politik Erdogan dibalik semua hingga saat ini ia telah terlegitimasi sebagai pemimpin yang otoriter. Hal ini masuk akal jika mengingat kekuasaan Erdogan, secara konstitusi hanya bisa bertahan atau akan selesai di periode kedua presiden jika ia terpilih lagi pada tahun 2019, maka ia hanya bisa berkuasa sampai tahun 2024. Namun dengan amandemen konstitusi, penerapan pembatasan itu akan mulai pada tahun 2019. Dengan demikian Erdogan mulai tahun 2019, dapat memimpin dua periode sehingga masa jabatannya bisa berlangsung hingga tahun 2029 untuk dua periode lima tahunan. Erdogan sebagai penguasa Turki yang telah berkuasa belasan tahun sejak 2003 yang dimulai sebagai Perdana Menteri, tentu saja akan mengamankan *status quo* nya sebagai penguasa dengan mempertahankan kekuasaannya dengan waktu yang lebih lama.

Namun secara normatif, tindakan represif dan otoriter yang dilakukan oleh Erdogan bertujuan untuk menciptakan stabilitas nasional dan menjaga pembangunan bidang sosial, ekonomi dan politik tetap berjalan dengan baik. Mengingat setelah Turki diguncang kudeta, imbasnya membuat situasi

politik di negara Turki tidak stabil. Terjadinya kegaduhan dan kesemrawutan dalam politik antara eksekutif dan legislatif , serta perekonomian Turki yang juga terus melemah.

Selain itu Erdogan dan AKP sebagai elit dan pemegang tampuk kekuasaan Turki juga melakukan kalkulasi politik dimana tindakan yang represif dan otoriter kepada lawan-lawan politik nampaknya menjadi jalan terbaik guna menangkal ancaman-ancaman baru di kemudian hari. Selain itu Pemerintah sebagai aktor rasional tentu mempertimbangkan resiko jika tindakan yang demokratis dijalankan .Maka dengan cara yang bersifat otoriter, kekuasaan dan kepentingan Erdogan dan AKP tetap bisa berjalan.

Perubahan sistem dari parlementer menjadi presidensial telah menjadikan kekuasaan Erdogan semakin luas, karena memungkinkan presiden mengumumkan keadaan darurat, mengeluarkan dekrit di luar masa keadaan darurat, menunjuk menteri dan pejabat negara, serta membubarkan parlemen. Kubu oposisi dan penentang Erdogan meyakini bahwa keinginan tokoh-tokoh politik AKP untuk mengubah sistem politik di negara Turki berbeda secara substansial, karena hanyalah cara menjadikan Erdogan semakin berkuasa dan otoriter. Namun bagi Erdogan dan koalisi ini merupakan cara untuk menciptakan politik yang efisien dan terciptanya struktur pemerintahan menjadi lebih ramping. Perdana Menteri Binali Yildirim, yang juga politisi AKP juga meyakini bahwa dengan keberhasilan referendum tersebut maka Erdogan akan bisa meningkatkan perekonomian, mempercepat pembangunan dan melawan musuh asing serta domestik.